

DAMPAK SOSIOLOGIS WADUK JATIGEDE TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR

Oleh:

ELA NURLELA (NIM: 208 100 289)

ABSTRAK

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa dampak dari pembangunan sebuah waduk akan lebih banyak dampak negatifnya dibandingkan dampak positifnya. Seperti pembangunan-pembangunan waduk yang telah dibangun di beberapa daerah/negara lain. Untuk menelusuri kebenaran dan pemikiran tersebut, maka penulis bermaksud untuk menyelidiki kebenaran pemikiran tersebut, yakni melalui penelitian di Desa Leuwihideung, Sumedang. Karena Desa Lewihideung merupakan salah satu desa yang akan menjadi calon genangan akibat Pembangunan Waduk Jatigede.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Dalam hal ini dilakukan pencarian fakta-fakta, interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran/lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena yang diselidiki. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis data kualitatif, dengan cara memeriksa seluruh data yang telah dikumpulkan, dikategorisasikan, analisa data, mengkonfirmasi hasil analisa data dengan teori-teori dalam kajian sosiologi yang berhubungan dengan tema, setelah data teranalisis baru dapat disimpulkan. Adapun teknik observasi dan wawancara digunakan sebagai alat pengumpul data dalam penelitian.

Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa dampak yang paling menonjol dirasakan masyarakat Desa Leuwihideung akibat Pembangunan Waduk Jatigede adalah dampak ekonomi dan sosial. Yaitu, masyarakat menuntut agar pemerintah segera memberikan uang ganti rugi/uang gusuran, serta percepatan perelokasian penduduk karena, pembangunan fisik Jatigede sudah mencapai 73%an, namun masalah perelokasian penduduk masih terkatung-katung. Sedangkan untuk respon masyarakat, hampir seluruh masyarakat yang telah di wawancarai mengatakan tidak setuju dengan pembangunan tersebut. Serta pemerintah berupaya dalam menanggulangi dampak akibat pembangunan tersebut.

I. PENDAHULUAN

Konsep “Pembangunan” pada mulanya, dan pada dasarnya, diacukan kepada pengertian pembangunan ekonomi. Dari sudut ekonomi, “Pembangunan”

berarti suatu proses di mana *real per capita income* dari satu negara meningkat dalam suatu masa panjang, dan dalam masa yang bersamaan jumlah penduduk yang “di bawah garis kemiskinan” tidak bertambah, dan distribusi pendapatan tidak makin senjang. Dari sudut ilmu-ilmu sosial, “Pembangunan” sering kali diartikan sangat umum, yaitu “perubahan sosiokultural yang direncanakan” (Amri Marzali, 2009: 55).

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan, seiring pembangunan terus berjalan, namun distribusi air tawar secara global tidak merata dan tidak sejalan dengan distribusi jumlah populasi manusia. Asia yang berpendudukan 61% dari populasi dunia, memiliki 36% sumber daya air yang berasal dari *run off* (limpahan air hujan). Sejak 1970, kelangkaan air telah membunuh 24.000 jiwa/tahun dan menciptakan jutaan pengungsi. Menurut PPP, tahun 1998, terdapat sekitar 25 juta penduduk mengungsi dari tempat tinggalnya karena kekeringan air (Agoes Soegianto, 2005: 68).

Untuk meningkatkan suplai air tawar, secara umum dapat dilakukan dengan cara berikut:

1. Membangun dam atau waduk untuk menyimpan *run off* air hujan.
2. Mengambil air dari tempat DAS lain.
3. Mengambil air tanah.
4. Mengkonversi air asin menjadi air tanah.
5. Memperbaiki efisiensi penggunaan air tawar.

Tujuan utama membangun dam atau waduk adalah untuk menahan dan menyimpan air *run off* dan melepaskan kembali sesuai keperluan (Agoes Soegianto, 2005: 69-70).

Maka salah satu strategi yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan di Sumedang khususnya adalah membangun waduk. Dalam rangka Pembangunan Waduk tersebut, pemerintah mensosialisasikan berbagai keunggulan dan kelebihan pembangunan waduk dalam menumbuhkan kesejahteraan masyarakat. Seluruh sektor tanpa kecuali, terjamah program pemerintah tersebut.

Selama periode itu, bahkan hingga sekarang, jejak strategi Pembangunan Waduk itu terlihat dari pembangunan waduk-waduk yang berada di Indonesia. Pembangunan waduk sebagai sebuah strategi, memang tidak selalu menyisakan akibat positif. Seiring kehadiran Pembangunan Waduk tersebut juga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat calon genangan.

Sasaran utama pembangunan adalah untuk mencapai masyarakat adil dan makmur serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Untuk mencapai sasaran tersebut salah satunya pemerintah pada saat ini membangun sebuah proyek raksasa yaitu proyek Pembangunan Waduk Jatigede.

Pada hakikatnya pembangunan waduk lebih menjanjikan keuntungan. Pembangunan waduk merupakan proses pembuatan kolam besar tempat menyimpan air sediaan untuk berbagai kebutuhan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007: 939). Waduk dapat terjadi secara alami maupun dibuat manusia. Waduk buatan dibangun dengan cara membuat bendungan, lalu dialiri air sampai waduk tersebut penuh.

Gagasan pembangunan Waduk Jatigede diajukan pertama kali pada tahun 1963 oleh pemerintah, kemudian ditindak lanjuti dengan *Detail Design* pada tahun 1986 oleh konsultan SMEC, Australia. Kemudian direview kembali pada tahun 2004 oleh konsultan PT. Indra Karya JO serta PT. Wiratman dan telah mendapatkan sertifikat desain dari Menteri Pekerjaan Umum pada tanggal 23 Februari 2006 (Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Pembangunan Waduk Jatigede, 2011).

Pembangunan Waduk Jatigede merupakan strategi pemerintah untuk mengatasi kekeringan di musim kemarau dan banjir di musim penghujan khususnya di daerah Pantura Jawa Barat (Kabupaten Majalengka, Cirebon, dan Indramayu). Waduk Jatigede diharapkan dapat berfungsi sebagai penyedia air baku khususnya untuk areal pertanian yang merupakan salah satu penyediaan padi regional dan nasional, di samping kepentingan-kepentingan lainnya yang bersifat strategis, seperti pembangkit tenaga listrik, perikanan, dan pariwisata.

Lahan yang dibutuhkan seluas 4.891,13 ha yang meliputi lima Kecamatan dan dua puluh enam desa, yang terdiri dari Kecamatan Jatigede (751,45 ha), Kecamatan Jatinunggal (229,25 ha), Kecamatan Wado (461,22 ha), Kecamatan Darmaraja (1.606,36 ha), Kecamatan Cisitu (73,45 ha), tanah kehutanan (1.200 ha), tanah terlewat (107 ha), serta puluhan situs sejarah ikut tersapu (Pemerintah Kabupaten Sumedang, 2009).

Menurut Laporan Akhir RDTR tahun 2009, wilayah calon genangan bendungan penduduknya berjumlah 191.198 jiwa. Serta luas wilayahnya 450,25 km². Sedangkan jumlah penduduk yang tergusur secara fisik dari daerah proyek

berjumlah 17.896 KK, dan jumlah penduduk yang tergusur secara ekonomi berjumlah 3.911 KK, jadi jumlah seluruhnya yaitu 21.807 KK (Pemerintah Kabupaten Sumedang, 2009).

Dengan proses perjalanan yang sangat panjang. Sehingga menimbulkan berbagai permasalahan terutama masalah dampak yang diakibatkan oleh pembangunan tersebut. Yang terdiri dari dampak ekonomi, sosial, budaya dan ekologi. Pembebasan tanah berikut tegakkannya dari tahun 1982 sampai sekarang belum tuntas. Ini merupakan hambatan dan kendala terhadap seluruh aktifitas Pembangunan Waduk Jatigede.

Dampak permasalahan ini pun mengakibatkan perbedaan pandangan yang terbalik seakan Pembangunan Waduk Jatigede bukan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, melainkan dengan berjalannya Pembangunan Waduk Jatigede jelas akan menimbulkan pro dan kontra rakyat secara berkesinambungan.

Masyarakat yang terkena gusuran memang terdapat pro dan kontra terhadap Pembangunan Waduk Jatigede. Di mana, yang pro adalah masyarakat yang berada dibagian hilir dan nantinya akan mendapatkan manfaatnya. Sedangkan yang kontra adalah yang takut terkena penenggelaman tempat tinggalnya tetapi tidak mendapatkan manfaatnya.

Studi sosiologi pembangunan dalam penelitian ini yaitu di Desa Leuwihideung, Sumedang. Penduduknya yang berjumlah 1.768 orang yang terdiri dari 526 KK. Sedangkan luas wilayah Desa Leuwihideung yaitu 209,1 ha (Daftar isian potensi Desa Leuwihideung, 2011).

II. Metodologi Penelitian

1. Menentukan Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Leuwihideung, Sumedang. Karena wilayah ini merupakan wilayah genangan yang diakibatkan oleh Pembangunan Waduk Jatigede, di mana Pembangunan Waduk Jatigede tidak jauh dari Desa Leuwihideung.

2. Menentukan Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengadakan suatu penelitian untuk mencapai tujuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu suatu penelitian untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi mengenai kenyataan sosial. Alasan digunakan metode ini adalah untuk menggambarkan realitas keadaan masyarakat calon genangan dengan adanya Pembangunan Waduk Jatigede. Yang terdiri dari dampak ekonomi, sosial, budaya, dan ekologinya.

Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif, yaitu sebuah metode yang cirinya memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah yang bersifat aktual serta menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi rasional, caranya dengan mengumpulkan dan menganalisa data yang berkaitan dengan obyek kajian. Metode ini bertujuan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Sumadi Suryabrata, 1998: 18).

Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan.

Pertama, karena metode kualitatif sesuai dengan orientasi riset ini untuk mendeskripsikan kenyataan. *Kedua*, metode ini mengkaji secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. *Ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Lexy J. Moleong, 2001: 5).

3. Sumber Data

Sesuai dengan bentuk dan penelitian ini, maka sumber data yang penulis peroleh dari data lapangan yang dilakukan dengan cara observasi ataupun wawancara. Sumber data yang dijadikan referensi oleh penulis, selanjutnya dibagi kedalam dua kategori, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ini didapat dari lapangan baik dari hasil observasi maupun wawancara dengan informan. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini di antaranya:

1. Kepala dan Sekretaris Desa Leuwihideung.
2. Pengelola situs budaya Desa Leuwihideung.
3. Pihak Satuan Kerja (SATKER) Pembangunan Jatigede.
4. Pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDDA) Sumedang.
5. Pihak Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sumedang.
6. Beberapa orang masyarakat Leuwihideung.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data Sekunder, yaitu sumber-sumber lain yang menunjang sumber data primer, adapun data sekunder untuk penelitian ini adalah responden yang menjadi sesama penelitian. Selain itu, penelitian ini menggunakan data tambahan berupa dokumen, arsip, buku-buku referensi, dan sumber data lainnya yang dapat menunjang terhadap sumber data penelitian mengenai Pembangunan Waduk Jatigede, khususnya mengenai dampak ekonomi, sosial, budaya dan ekologi yang diakibatkan Pembangunan Waduk Jatigede. Sumber buku yang dijadikan sumber data di antaranya buku *Perspektif tentang perubahan sosial. Sosiologi pembangunan, Sosiologi Suatu Pengantar, Aspek sosial AMDAL* dan sebagainya.

4. Jenis Penelitian

Dalam membahas dampak Pembangunan Waduk Jatigede terhadap masyarakat calon genangan di Desa Leuwihideung, Sumedang, peneliti menggunakan cara literatur dan penelitian lapangan.

Data yang akan dikumpulkan tersebut yaitu jenis data-data tentang kata-kata dan tindakan yang terdapat dalam perumusan masalah di atas, yang terdiri dari data-data mengenai dampak ekonomi, sosial, budaya dan ekologi yang diakibatkan oleh pembangunan Waduk Jatigede tersebut, serta data mengenai rencana pemerintah untuk penanggulangan dampak tersebut. Data ini dikumpulkan dengan cara menggunakan daftar pertanyaan secara rinci atau panduan wawancara.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan permasalahan dan metode penelitian di atas, maka dalam pengumpulan data ini digunakan beberapa teknik berikut:

a. Observasi

Observasi adalah suatu istilah umum yang mempunyai arti semua bentuk penerimann data yang dilakukan dengan cara merekam kejadian, menghitungnya, mengukurnya dan mencatatnya Kerlinger dalam bukunya Suharsimi Arikunto (2010: 265).

Dalam teknik ini diadakan suatu kegiatan seperti datang ke lokasi langsung dan melakukan interaksi dengan masyarakat dan pihak Waduk Jatigede. Kemudian mengadakan pencatatan secara sistematis sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan. Observasi dilakukan untuk mendapatkan data yang sebenar-benarnya. Digunakannya teknik ini yaitu untuk mengetahui realita yang sebenarnya keadaan di tempat penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, pengamatan sangat penting dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya seperti yang dikemukakan oleh Guba dan Lincoln dalam buku Lexy J. Moleong (2006: 174), yaitu *pertama*, teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung. Tampaknya pengalaman langsung merupakan alat yang mampu untuk mengetes suatu kebenaran. Jika suatu data yang diperoleh kurang meyakinkan, biasanya peneliti ingin menanyakan kepada subjek, tetapi karena ia hendak memperoleh keyakinan tentang keabsahan data tersebut, jalan yang ditempuhnya adalah mengamati sendiri yang berarti mengalami langsung peristiwanya. *Kedua*, teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana terjadi pada keadaan sebenarnya.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data secara langsung melalui dialog dengan responden. Dalam teknik ini pengumpulan data dilakukan melalui mekanisme tanya jawab dengan responden secara langsung dan sistematis. Dengan teknik ini unsur subjektivitas dapat tercapai, dikarenakan pesan komunikator (pewawancara) dan yang diwawancarai (responden). Ini artinya berhadapan fisik dengan subyeknya (Sutrisno Hadi, 1987: 192).

Alasan digunakannya teknik wawancara ini adalah untuk mendapatkan data yang lebih akurat karena menanyakan langsung kepada objeknya (*key informan*). Penulis akan mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan, seperti masyarakat, KADES, SATKER, BLH, BAPPEDA, serta pihak-pihak lain yang akan diperlukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

c. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan melihat berbagai dokumentasi yang ada di berbagai instansi-instansi atau lembaga-lembaga yang terkait dengan penelitian. Data yang dikumpulkan adalah data-data dari lembaga yang berhubungan dengan penelitian seperti kantor desa, SATKER, BLH, BAPPEDA dan sebagainya. Serta data-data yang berkaitan dengan penelitian ini, misalnya data dari koran, catatan-catatan, arsip-arsip dan lain sebagainya.

6. Studi pustaka

Studi pustaka yaitu studi atau kajian terhadap artikel-artikel atau buku yang ditulis oleh para ahli yang memberikan pendapat-pendapat, pengalaman teori-teori atau ide-ide tentang apa yang baik dan buruk yang tidak diinginkan berkaitan dengan masalah (Imam Suprayogo, 2001: 131).

Dalam teknik ini yang harus dilakukan adalah mengkaji dan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas, dengan tujuan untuk memperoleh berbagai informasi dari berbagai data yang diperlukan.

7. Analisis data

Langkah ini dimaksudkan untuk mengolah seluruh data yang sudah terkumpul. Proses ini dimulai dengan mengedit (*editing*) atau memeriksa seluruh instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data. Proses editing ini untuk memastikan keabsahan dan kesempurnaan pengisian data sesuai dengan yang diharapkan dalam penelitian ini.

Proses berikutnya adalah mengkategorisasikan data-data tersebut berdasarkan karakter informasi yang dibutuhkan. Proses kategorisasi berguna untuk memudahkan dalam langkah berikutnya, yaitu analisa dan pembacaan data.

Analisa data juga merupakan proses membaca data, informasi dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tema penelitian. Dari proses analisa ini peneliti dapat mengambil hipotesis serta konklusi dari informasi yang dikumpulkan. Langkah berikutnya ialah mengkonfirmasi hasil analisa data dengan teori-teori dalam kajian sosiologi yang berhubungan dengan tema yang menjadi objek penelitian.

Setelah data yang dikumpulkan terkumpul seluruhnya, baik yang diperoleh dari observasi maupun wawancara. Untuk langkah selanjutnya adalah pengolahan data untuk menganalisa data kualitatif dilakukan sedemikian rupa dalam bentuk analisa logis dan interpretasi-interpretasi secara kontekstual. Berdasarkan kriteria

tersebut, penulis dapat menyimpulkan hasil data analisa yang diperoleh dalam penelitian.

B. Langkah-langkah Penelitian

Untuk memudahkan penelitian ini, penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menetapkan Fokus Penelitian

Dalam melakukan penelitian kualitatif langkah awal sebelum melakukan penelitian yang harus diperhatikan adalah hal pertama yang dilakukan sebelum memulai seluruh tahap penelitian adalah menetapkan *research question*, yang dalam penelitian kualitatif disebut sebagai fokus penelitian adalah deretan pertanyaan mengenai hal yang ingin diketahui oleh peneliti terhadap objek kajian.

2. Menentukan Setting dan Subjek Penelitian

Setting penelitian adalah sesuatu yang penting yang ada dalam penelitian yang sebelumnya fokus kajian telah ditentukan. Dalam penelitian kualitatif, setting penelitian akan menunjukkan lokasi penelitian yang langsung pada fokus penelitian yang telah ditetapkan sejak awal. Setting penelitian ini tidak dapat diubah kecuali fokus penelitiannya.

Subjek penelitian ini tepatnya informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah beberapa orang masyarakat Leuwihideung, kepala dan sekretaris Desa Leuwihideung, pengelola situs-situs budaya Desa Leuwihideung, pihak SATKER, BLH, serta pihak BAPEDDA.

3. Pengolahan Data, dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dapat dilakukan secara bersamaan selama dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul, akan tetapi ketika berjalannya proses penelitian pengolahan dan analisis data dapat dilakukan, analisis data tidak mutlak dilakukan setelah pengolahan data selesai. Dalam hal ini peneliti dapat mengolah data yang ada, kemudian apabila data yang dibutuhkan belum terpenuhi maka peneliti dapat ke lapangan kembali untuk melakukan penelitian.

4. Penyajian Data

Pada dasarnya penyajian data dapat dilakukan dengan cara membagi pandangan kita tentang suatu hal. Maka data yang diperoleh ketika dilapangan adalah berupa kata-kata bukan bentuk angka, sering kali data adalah sebuah kutipan langsung hasil wawancara dengan informan. Hasil penelitian kualitatif juga dapat disajikan dalam bentuk deksripsi tentang peristiwa dan pengalaman.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Pembangunan Waduk Jatigede

Pembangunan Waduk Jatigede merupakan strategi pemerintah untuk mengatasi kekeringan di musim kemarau dan banjir di musim penghujan, khususnya di daerah pantura Jawa Barat (Kabupaten Majalengka, Cirebon, dan Indramayu). Pembangunan Waduk Jatigede sudah direncanakan sejak tahun 1963. Sedangkan studi analisis dampak lingkungan hidup (AMDAL) proyek Pembangunan Waduk Jatigede selesai disusun pada tahun 1992, dan telah disetujui

oleh Menteri Pekerjaan Umum melalui Surat Keputusan No. KL. 0320 MN/10401, tanggal 7 September 1993.

Hasil wawancara pribadi dengan Sekretaris Administrasi SATKER (Diki, tanggal 11 Juni 2012, di kantor SATKER), mengatakan bahwa Pembangunan Waduk Jatigede tersebut mulai direalisasikan pada tahun 2005. Namun sampai sekarangpun pembangunan tersebut belum selesai juga, karena disebabkan oleh cukup kompleksnya permasalahan yang ada di masyarakat. Mengingat proses realisasi kegiatan pembangunan bendungan serbaguna relatif lama, maka telah dikaji kembali pada tahun 2007 dan mendapatkan rekomendasi komisi penilai AMDAL daerah Provinsi Jawa Barat melalui surat No. 660.1/3261/1/2007, tanggal 12 Desember 2007, dinyatakan bahwa studi AMDAL Pembangunan Bendungan Serbaguna Jatigede dapat disetujui sepenuhnya dipergunakan kembali. Rekomendasi tersebut kemudian diperkuat dengan Surat Gubernur Jawa Barat No. 660/161-BPLHD, tanggal 24 Januari 2008 tentang penilaian status AMDAL Bendungan Serbaguna Jatigede (Badan Lingkungan Hidup, 2012: I-1 sampai dengan I-2).

Waduk ini akan menggenangi 26 desa pada 5 kecamatan di Kabupaten Sumedang. Di samping itu, Waduk Jatigede diharapkan dapat berfungsi sebagai penyedia air baku khususnya untuk areal pertanian yang merupakan salah satu penyediaan padi regional dan nasional, di samping kepentingan-kepentingan lainnya yang bersifat strategis, seperti pembangkit tenaga listrik, perikanan dan pariwisata.

Di Jawa Barat bencana tersebut sering melanda daerah Pantai Utara Jawa Barat bagian timur yang merupakan wilayah DAS Cimanuk bagian hilir. Meliputi Indramayu dan Cirebon serta daerah rawan banjir di wilayah Pantai Utara Jawa Barat seluas 76.000 ha. Di daerah tersebut terdapat Daerah Irigasi Rentang seluas 90.000 ha yang merupakan irigasi teknis.

Kondisi tersebut menuntut upaya pemerintah untuk mengelola yang terencana baik jangka panjang maupun pendek. Upaya jangka panjang yang bisa dilakukan adalah dengan perbaikan daerah tangkapan air dengan cara-cara:

1. Perluasan daerah resapan
2. Penghutan kembali
3. Upaya vegetatif lain

Sedangkan upaya jangka pendek yang bisa dilakukan adalah dengan membangun prasarana pendukung agar bencana banjir dan kekeringan dapat diatasi. Prasarana pendukung tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktifitas sektor pertanian secara berkelanjutan sehingga distribusi pendapatan dapat merata di masyarakat khususnya bagi para petani di Jawa Barat, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Prasarana pendukung yang perlu dibangun adalah pembangunan prasarana sumber daya air, dalam hal ini pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang.

Fluktuasi debit di sungai Cimanuk yang tercatat di bendung rentang sangat besar : $Q_{max} = 1.004 \text{ m}^3/\text{det}$; $Q_{min} = 4 \text{ m}^3/\text{det}$, Ratio = 251. Lahan kritis DAS Cimanuk pada saat ini telah mencapai kurang lebih 110.000 Ha atau sekitar 31% dari luas DAS Cimanuk. Potensi air sungai Cimanuk di rentang rata-rata sebesar

4,3 milyar m³/tahun dan hanya dapat dimanfaatkan 28% saja, sisanya terbangun ke laut karena belum ada waduk (Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Pembangunan Waduk Jatigede, 2011).

Sistem irigasi rentang seluas 90.000 Ha sepenuhnya mengandalkan pasokan air dari sungai Cimanuk (*river runoff*), sehingga pada musim kemarau selalu mengalami depisit air irigasi yang mengakibatkan kekeringan. Disamping itu, di wilayah hilir sungai Cimanuk (pantura Cirebon, Majalengka dan Indramayu (CIAYU)) pada musim kemarau terjadi pula krisis ketersediaan air baku untuk keperluan domestik, perkotaan dan industri.

Waduk Jatigede perlu segera dibangun guna mengatasi krisis air tersebut, baik untuk menjamin ketersediaan air irigasi rentang maupun air baku untuk wilayah pantura CIAYU.

Menurut pemerintah Kabupaten Sumedang dan hasil wawancara dengan pihak BAPPEDA, BLH, dan SATKER mengatakan bahwa manfaat Pembangunan Waduk Jatigede, direncanakan sebagai berikut :

- a) Mampu mengairi sawah dengan peningkatan irigasi teknis seluas 130.000 Ha dengan pola tanam minimal 2 kali (padi). Pembangunan waduk ini dapat mendukung usaha-usaha pemanfaatan swasembada pangan khususnya di Propinsi Jawa Barat dengan peningkatan hasil panen sekitar 310.000 ton/tahun atau setara dengan US \$ 37,5 juta/tahun dengan mengintensifkan sekitar 111,152 Ha sawah beririgasi yang ada dan 16.058 Ha sawah tadah hujan.

- b) Sebagai sumber tenaga listrik, di mana berdasarkan studi yang dilakukan oleh PLN kebutuhan tenaga listrik di Jawa meningkat setiap saat. Kebutuhan tersebut masing-masing sebesar 7.000 MW, 11.500 MW, dan 17.500 MW pada tahun 1995, 2000 dan 2005. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik, diharapkan PLTA Jatigede (175 MW) dapat berkontribusi memenuhi kebutuhan tersebut selain PLTA Cipasang (400 MW) yang akan difungsikan sesudahnya. Pendapatan yang diperoleh dari beroperasinya listrik tenaga air sekitar US \$ 18 juta/tahun (produksi rata-rata 750 GWH/tahun).
- c) Mampu menyediakan air untuk keperluan industri maupun domestik, seperti air tawar untuk tambak dan air bersih. Hasil dari pertambakan diperkirakan meningkat sekitar US \$ 12,2 juta/tahun dan hasil perikanan jaring terapung di daerah Genangan Waduk sekitar US \$ 4,6 juta/tahun
- d) Sebagai pengendali banjir, di mana penghematan dari kerusakan akibat banjir sekitar US \$ 270.000/tahun dan meningkatkan pengamanan daerah seluas 76.700 Ha dari ancaman banjir dari periode ulang 25 tahun menjadi 100 tahunan.
- e) Secara lebih nyata jika Waduk Jatigede dibangun akan memberikan manfaat sekitar 4,8 juta penduduk yang tinggal di DAS Cimanuk bagian hilir, khususnya pada daerah yang terkait seperti Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Majalengka.
- f) Mengurangi dampak akibat intrusi air laut di daerah Pantura

- g) Pengembangan industri wisata di Kabupaten Sumedang dan membuka lapangan kerja baru.

B. Dampak Pembangunan Waduk Jatigede Terhadap Masyarakat

1. Dampak Ekonomi

Sejalan dengan visi Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) adalah “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”, diwujudkan melalui tiga misi yang menjadi fokus utamanya (BAPPEDA, 2011: 52), yaitu:

1. Peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses produksi serta distribusi dari pengelolaan asset dan akses (potensi) SDA, geografis wilayah, dan SDM, melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis di dalam maupun antar kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
2. Mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran serta integrasi pasar domestik dalam rangka penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian nasional.
3. Mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses, maupun pemasaran untuk penguatan daya saing global yang berkelanjutan, menuju *innovation driven economy*.

Keperluan akan sumber daya air terus menerus meningkat baik ditujukan bagi pengairan, keperluan umum dan pemukiman, pengembangan industri, pembangkit tenaga, perikanan, perhubungan, pariwisata maupun maksud lainnya. Upaya pembendungan DAS, genangan atau bentuk sumberdaya air lainnya telah banyak dilakukan dalam rangka memenuhi keperluan air dan tenaganya, untuk itu dibentuk waduk (*reservoir/man made lakes*).

Kecamatan yang berada di kawasan Waduk Jatigede (Cisitu, Darmaraja, Jatigede, Jatinunggal dan Wado) merupakan kecamatan yang memiliki kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB kecamatan lebih dari 40%. Namun dengan adanya

Pembangunan Waduk Jatigede, berdasarkan data dari SATKER Jatigede dan hasil wawancara dengan Sekretaris Administrasi SATKER Jatigede (Bapak Diki, tanggal 11 Juni 2012, di kantor SATKER Jatigede) mengatakan, bahwa “tidak kurang dari 1500 Ha lahan pertanian yang akan hilang dan tidak kurang 1200 Ha lahan hutan yang akan hilang sehingga akan menyebabkan penurunan produksi pertanian dan produksi hasil hutan pada tahun-tahun berikutnya”.

Seperti hasil wawancara pribadi dengan pihak BAPPEDA, BLH dan pihak SATKER (Mety, tanggal 6 Juni 2012, Gandhi, tanggal 13 Juni 2012, dan Diki, tanggal 11 Juni 2012, di kantor), mengatakan bahwa terdapat beberapa dampak ekonomi yang diakibatkan oleh Pembangunan Waduk Jatigede terhadap masyarakat yang terkena dampak, di antaranya:

Dampak secara ekonomi dengan terjadinya peralihan fungsi lahan pertanian dan kehutanan akibat Pembangunan Waduk Jatigede antara lain adalah:

1. Kehilangan mata pencaharian masyarakat dengan adanya peralihan fungsi lahan pertanian menjadi waduk. Mata pencaharian masyarakat OTD Waduk Jatigede pada umumnya adalah petani sawah dan petani hortikultural serta sebagian masyarakat memiliki usaha peternakan, sejak pembangunan Waduk Jatigede dimulai lahan pertanian sebagian besar tidak dapat difungsikan lagi karena sumber mata air ada yang tertutup sehingga lahan mengalami kekeringan, sedangkan di daerah genangan sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakatnya. Masyarakat peternak sebagian besar tidak dapat memperoleh pakan ternak karena hijauan ternak sebagian besar tertutup oleh debu sehingga membahayakan bagi ternak mereka dan bisa menyebabkan kematian bagi ternak

Hasil penelitianpun sama dengan apa yang dikatakan oleh pihak (BAPPEDA, BLH, dan SATKER) tersebut, setelah diteliti ternyata sebagian penduduk yang sangat dekat dengan daerah pembangunan tersebut sudah ada yang pindah, terlihat dari rumah-rumahnya yang kosong dan tidak layak pakai.

Alih fungsi lahan pertanian seluas 1.500 Ha, apabila rata-rata kepemilikan lahan pertanian setiap petani $\pm 0,25$ Ha maka jumlah petani yang akan kehilangan lahan pertaniannya sebanyak 6.000 orang petani dan apabila setiap petani mempekerjakan 2 orang penggarap dan 5 orang buruh tani maka masyarakat yang akan kehilangan mata pencaharian dari sektor pertanian adalah 42.000 orang.

2. Kehilangan produksi pertanian dengan adanya peralihan fungsi lahan khususnya produksi padi. Apabila produktivitas beras rata-rata Kabupaten Sumedang adalah 6 ton per hektar/tahun maka Kabupaten Sumedang akan kehilangan produksi beras sebanyak 9.000 ton/tahunnya, setelah Pembangunan Waduk Jatigede.

Memang benar dengan adanya pembangunan Waduk Jatigede tersebut akan mengalami penurunan produksi padi, karena terlihat juga di daerah genangan itu sebagian besar wilayahnya pertanian, dan mata pencaharian penduduk OTD sebagian besar bertani. Dan jelas akan mengalami perubahan dari segi mata pencaharian.

Seperti hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat Desa Leuwihideung (Didi, tanggal 25 Juni 2012, di kediamannya) mengatakan “kalau pembangunan tersebut sudah jadi, lalu usaha kita di tempat yang baru nanti bagaimana?. Sedangkan keahlian Bapak cuma bisa dalam bertani saja”

3. Penurunan populasi ternak. Sejak Pembangunan Waduk Jatigede dimulai lahan pertanian sudah mulai berkurang dan hijauan makan ternakpun sudah mulai berkurang baik kuantitasnya maupun kualitasnya karena tebalnya debu yang menempel di hijauan makan ternak mengakibatkan kualitasnya menurun dan bisa berakibat fatal atau mematikan bagi ternak yang mengkonsumsinya.

4. Kehilangan produksi hutan dengan adanya peralihan fungsi lahan perhutani menjadi waduk. Kehilangan lahan hutan menyebabkan penurunan produksi kehutanan selain itu juga produksi hasil kebun pisang yang ditanam oleh masyarakat sekitar lahan hutan sehingga produksi pisang yang biasanya melimpah menurut salah seorang warga bahwa sebelum dimulai Pembangunan Waduk Jatigede mereka bisa menjual hasil panen pisang sebanyak tiga truk/hari namun sejak Pembangunan Waduk Jatigede mengalami penurunan.

Penyelesaian permasalahan ekonomi yang timbul dari dampak Pembangunan Waduk Jatigede membutuhkan strategi dan program yang tepat agar kelak tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar dan menimbulkan kerugian bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang umumnya dan khususnya kerugian bagi masyarakat yang terkena dampak.

Untuk masalah dampak ekonomi tersebut, Bupati Sumedang (H. Don Murdono) menyampaikan usulannya kepada ketua Komisi V DPR RI dalam lampiran suratnya pada tanggal 4 Oktober 2011, isi usulan tersebut di antaranya”

“pengembangan sumber mata pencaharian OTD sesuai dengan kualifikasi keahlian dan keterampilannya, pembangunan infrastruktur pasar di Jatigede dan pasar Sarimekar dan sub Terminal (tanah telah tersedia), pembangunan Bendung Rengrang, pengembangan daerah irigasi, peningkatan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan kawasan minapolitan, bantuan bibit

dan pembinaan ternak sapi, kambing dan domba, pengembangan parit, pengembangan jalan usaha tani dan sebagainya ”.

Sedangkan manfaat Pembangunan Waduk Jatigede dalam aspek ekonomi (wawancara pribadi dengan Mety, tanggal 6 Juni 2012, Gandhi, tanggal 13 Juni 2012, dan Diki, tanggal 11 Juni 2012, di kantor) di antaranya:

1. Mampu mengairi sawah dengan peningkatan irigasi teknis seluas 130.000 Ha dengan pola tanam minimal 2 kali (padi). Pembangunan waduk ini dapat mendukung usaha-usaha pemanfaatan swasembada pangan khususnya di Propinsi Jawa Barat dengan peningkatan hasil panen sekitar 310.000 ton/tahun atau setara dengan US \$ 37,5 juta/tahun dengan mengintensifkan sekitar 111,152 Ha sawah beririgasi yang ada dan 16.058 Ha sawah tadah hujan.
2. Pengembangan industri wisata di Kabupaten Sumedang dan membuka lapangan kerja baru.
3. Tahapan kegiatan pembangunan Waduk Jatigede yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap kesempatan kerja dan berusaha adalah tahap konstruksi dan tahap operasi. Tahap konstruksi pada kegiatan mobilisasi tenaga kerja membutuhkan sejumlah tenaga kerja baik tenaga kerja yang memiliki ketrampilan khusus maupun *unskilled*. Peluang kerja ini dapat diisi oleh penduduk yang tinggal di sekitar kegiatan Waduk Jatigede maupun di Kabupaten Sumedang terutama yang memiliki kualifikasi dan spesifikasi yang di butuhkan selama kegiatan. Pada tahap operasi sejumlah kegiatan yang akan dilaksanakan di antaranya kegiatan irigasi, PLTA, PDAM, Pariwisata, dan perikanan akan membutuhkan

sejumlah tenaga kerja baik sebagai tenaga kerja operator, staf maupun tenaga kerja harian. Diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat merekrut penduduk yang berada di sekitar lokasi kegiatan dan secara umum di Kabupaten Sumedang. Selain peluang kerja, kegiatan-kegiatan tersebut dapat menumbuhkan aktifitas usaha masyarakat baik formal maupun informal.

Keberadaan pembangunan Waduk Jatigede di Desa Cijeungjing Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, merupakan perubahan yang paling besar bagi masyarakat calon genangan khususnya masyarakat Desa Leuwihideung. Karena dengan adanya Pembangunan Waduk Jatigede tersebut akan berdampak bagi masyarakat di sekitarnya. Dampak yang sudah dirasakan oleh Masyarakat Leuwihideung salah satunya yaitu dampak ekonomi.

Karena masyarakat Desa Leuwihideung merupakan masyarakat yang bermata pencaharian sebagian besar petani. Mereka menghidupi keluarganya dari hasil bertani atau sebagai buruh tani. Sedangkan dengan adanya pembangunan Waduk Jatigede tersebut masyarakat Leuwihideung akan mengalami perubahan mata pencaharian. Setelah masyarakat direlokasikan, mereka akan mengalami perubahan mata pencaharian, bisa saja di tempat tinggal mereka nanti, mereka bermata pencaharian bukan sebagai petani lagi, apalagi kalau mereka masih tinggal di daerah sekitar Pembangunan Waduk Jatigede, mereka akan beradaptasi lagi dengan lingkungannya yang baru dan pekerjaannya pun bisa saja berubah. Karena di daerah sekitar pembangunan Waduk Jatigede sangat bagus untuk dijadikan pariwisata atau tempat-tempat penginapan yang lainnya.

Seperti hasil wawancara pribadi dengan Kepala Desa Leuwihideung (H. Amid Sunara, tanggal 8 Juni 2012, di kediamannya), beliau mengatakan bahwa dampak ekonomi yang sudah dirasakan oleh masyarakat Desa Leuwihideung sampai saat ini yaitu rendahnya atau turunnya kesemangatan kerja mereka terhadap pekerjaannya yang dilakukan saat sekarang. Itu merupakan dampak ekonomi yang dirasakan sekarang, belum lagi dampak ekonomi yang akan dirasakan oleh masyarakat Leuwihideung yang akan dirasakan apabila Pembangunan Waduk Jatigede sudah selesai dan masyarakat tersebut sudah direlokasikan.

Wawancara dengan masyarakat Lewihideungpun sama hasilnya dengan Kepala Desa Leuwihideung, para masyarakat Lewihideungpun mengatakan, “sampai sekarang dampak ekonomi belum sangat terasa oleh masyarakat Desa Leuwihideung, namun setelah masyarakat direlokasikan, pasti kita akan merasakan dampak ekonomi yang sesungguhnya”.

Perubahan mata pencaharian tersebut, tidaklah mudah bagi masyarakat yang lainnya untuk beradaptasi, karena mata pencaharian adalah hal yang paling utama untuk menghidupi keluarganya.

Pembayaran ganti rugi/uang gusuranpun sangat diharapkan masyarakat OTD, mereka ingin pembayaran/uang gusuran tersebut segera diselesaikan, jangan sampai hal tersebut terselat-sendat lagi.

2. Dampak Sosial

Kegiatan Pembangunan Waduk Jatigede telah menimbulkan sejumlah permasalahan sosial yang menimbulkan terjadinya sikap pro dan kontra di masyarakat terhadap kegiatan. Seperti hasil wawancara dengan Ketua Sub Bidang

Sosial BAPPEDA dan Ketua Sub Bidang AMDAL BLH (Mety dan Gandhi, tanggal 6 dan 13 Juni 2012, di kantor) bahwa secara umum berbagai permasalahan seputar kegiatan pembangunan Waduk Jatigede terbagi ke dalam kegiatan pembebasan lahan, pembayaran ganti rugi, dan pemindahan penduduk.

1. Kegiatan Pembebasan Lahan

Permasalahan seputar kegiatan pembebasan lahan yang dihimpun dari masyarakat di wilayah genangan maupun di luar genangan adalah yaitu :

- a. Pada saat kegiatan pembebasan lahan selama tahun 1984 sampai tahun 1986 di dalam pelaksanaannya tidak secara musyawarah tetapi melalui proses pemaksaan, ancaman dan intimidasi kepada masyarakat.

Pernyataan tersebut telah dirasakan oleh beberapa masyarakat yang telah diwawancarai, yang mengatakan bahwa waktu pembebasan lahan mereka terpaksa diukur lahannya, karena waktu itu masyarakat takut dengan ancaman pemerintah, kalau tidak mau diukur, nanti mereka tidak dapat menerima hasil ganti rugi tersebut.

Sedangkan Gandhi menjelaskan, “waktu pembebasan lahan tersebut, pemerintah sebenarnya tidak mengancam, namun dari pihak pemerintah ingin segera menyelesaikan pembangunan tersebut, dan di antaranya masalah dampak-dampak yang dihadapi waktu itu, harus segera ditangani, karena takutnya waktunya semakin molor lagi (hasil wawancara dengan Kasubid AMDAL BLH, tanggal 13 Juni 2012, di kantor BLH)”

- b. Tidak ada keterbukaan dalam proses pendataan lahan.

- c. Telah terjadi penipuan oleh oknum dari Pemda/BPN untuk melakukan pendataan dan merubah data lahan penduduk agar bisa mendapatkan ganti rugi yang besar, padahal pada kenyataannya tidak ada.
- d. Pada saat proses pengukuran lahan yang akan dibebaskan tidak diukur seluruhnya karena banyak warga yang ketakutan harus membayar pajak yang lebih besar. Hal tersebut telah ditegaskan juga oleh salah seorang warga Desa Leuwihideung yang telah diwawancarai (Eyoh, tanggal 24 Juni 2012, di kedimannya). “Nenek mah sieun mayar pajeg ageung-ageung, jadi dina masalah ukuran tanah teh teu sabener-benerna”.

2. Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi

Di dalam pelaksanaan pembayaran ganti rugi tidak seluruh ganti rugi diserahkan langsung kepada masyarakat, hal ini mengindikasikan telah terjadi berbagai penyimpangan dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam proses pelaksanaannya. Sehingga seperti halnya kegiatan pendataan dan pengukuran lahan, di dalam kegiatan pembayaran ganti rugi telah terjadi sejumlah permasalahan di dalam pelaksanaannya. Sejumlah permasalahan yang dapat dihimpun dari pendapat masyarakat, LSM, dan tokoh masyarakat adalah :

- a. Pembayaran ganti rugi lahan tidak dilaksanakan sekaligus, sehingga menimbulkan masalah. Penduduk yang telah mendapat ganti rugi menuntut harga yang sama dengan wilayah lain.

Hasil wawancara pribadi (Gandhi, Kasubid AMDAL, tanggal 13 Juni 2012, di kantor BLH), mengatakan mengenai hal pembayaran ganti rugi lahan yang tidak dilaksanakan sekaligus, beliau berkata “uang pembayaran tersebut kan dari

pemerintah, sedangkan pemasukan uang ke pemerintah sangat minim, keinginan pemerintahpun sama, ingin membayar ganti rugi tersebut sekaligus, namun uang dari mana?. Kalau masyarakat yang lain menginginkan pembayaran ganti rugi yang sama dengan masyarakat yang lainnya, apa itu bukan hal yang aneh?. Setiap pembayaran kan beda-beda tahunnya, pemerintah membayar ganti rugi tersebut sesuai dengan harga umum tanah atau lahan yang lainnya pada saat itu. Kalau masyarakat yang sudah dibayar pada tahun 1985an, dan iri kepada masyarakat yang dibayar pada tahun 2000an. Itu benar-benar aneh. ”

- b. Potensi terjadinya manipulasi data dan permainan dalam proses pembayaran ganti rugi.
- c. Di lapangan telah timbul pro kontra di masyarakat akibat kelambatan pembayaran.
- d. Pembayaran ditentukan secara sepihak oleh pihak desa, padahal sudah ada harga yang ditentukan menurut SK Bupati untuk tanah, pohon, bangunan dan tanah kuburan.

Menurut beberapa masyarakat yang telah diwawancarai mengatakan “hal tersebut memang benar, terlihat oleh masyarakat tersebut bahwa pihak desa telah memanipulasi harga tanah dan sebagainya, karena fakta tersendiri, pihak desa setelah pembayaran tersebut, malah semakin enak hidupnya, padahal beberapa orang pihak desa hanya memiliki sebidang tanah dan lain sebagainya sedikit, namun mengapa hasil pembayaran yang mereka terima lebih besar jumlahnya dari penerimaan hasil pembayaran masyarakat yang lebih luas lahannya?”

- e. Telah terjadi perbedaan dalam pelaksanaan pembayaran, ada yang secara langsung melalui Bank, dan ada pula yang secara kolektif maupun melalui perantara.
- f. Banyak penduduk yang tidak mengetahui tentang kebijakan harga yang ditetapkan dalam SK. Bupati Kabupaten Sumedang.

Beberapa masyarakat mengatakan “mereka tidak mengetahui soal harga yang telah ditentukan, namun waktu pembayaran mereka hanya menerima uang tersebut saja, tanpa bertanya mengapa uang ganti rugi tersebut hanya sebesar ini?. Karena mereka sebagai masyarakat masih memiliki rasa takut. ”.

- g. Terjadinya wilayah yang terlewat ganti rugi

Hasil wawancara dengan beberapa orang masyarakat Desa Leuwihideungpun sama seperti pernyataan tersebut. Mereka menegaskan terdapat permasalahan seputar pembayaran ganti rugi.

Hasil penelitian dari pihak BAPPEDA pada tahun 2011, dan hasil wawancara dengan Kasubid AMDAL BLH (Gandhi, tanggal 13 Juni 2012, di kantor BLH) serta beberapa orang masyarakat Desa Leuwihideung, mengatakan nilai ganti rugi yang telah ditetapkan dalam proses pelaksanaan pembayaran ganti rugi telah menimbulkan sejumlah permasalahan dan menimbulkan berbagai tuntutan baru di masyarakat. Berbagai permasalahan seputar nilai ganti rugi dapat dihimpun sebagai berikut :

- a. Nilai ganti rugi diberikan tidak sesuai dengan kehendak masyarakat dan harga umum. Padahal aturan ini sudah jelas tercantum dalam UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) No. 5 tahun 1960 dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri No. 15 tahun 1975 “bahwa pemberian ganti rugi harus berdasarkan harga umum setempat”.

Kasubid AMDAL (Gandhi, tanggal 13 Juni 2012, di kantor BLH), mengatakan “pemerintah sudah menetapkan keputusan yang seadil-adilnya untuk masyarakat mengenai nilai ganti rugi tersebut, dan telah menetapkan harga tersebut sesuai harga umum waktu itu, namun mungkin saja ada beberapa pihak/oknum yang telah mengaturnya sedemikian rupa tanpa sepengetahuan dari pihak pemerintah”.

- b. Terjadinya tuntutan ganti rugi baru dari masyarakat agar dilakukan penyesuaian dengan harga sekarang karena ganti rugi yang sudah diberikan terlalu rendah.
- c. Belum terjadinya kesesuaian harga dasar tanah yang ditetapkan sesuai SK Bupati yaitu Rp 14.000,-/meter untuk semua daerah dengan keinginan masyarakat. Sedangkan masyarakat yang telah diwawancarai menginginkan harga tinggi. Salah seorang masyarakat mengatakan “harga tanah di daerah genangan yang di tinggali sekarang Rp. 100.000,00/bata, sedangkan harga tanah di luar genangan sekitar Rp. 1.000.000,00/bata. Kami selaku masyarakat menginginkan harga ganti rugi tersebut lebih tinggi dari harga tanah di luar genangan.”
- d. Ada keinginan masyarakat agar harga lahan tidak dikelas-kelas tetapi sama untuk semua wilayah.

Hasil wawancara pribadi dengan Kasubid AMDAL (Gandhi, tanggal 13 Juni 2012, di kantor BLH), mengatakan “harga tanah tersebut di kelas-kelaskan dan terdapat ke dalam 5 kelas, yaitu: daerah perniagaan, daerah permukiman, daerah

pertanian, daerah perkebunan, dan daerah perhutanan. Harga setiap daerahnya berbeda-beda, harga yang paling tinggi yaitu harga daerah perniagaan, karena merupakan daerah mata pencaharian, dan terakhir yaitu daerah kehutanan, karena tidak dihuni oleh penduduk. Kalau di tanya apakah masyarakat mau tempat tinggal yang berada di pinggir jalan raya dengan tempat tinggal yang berada di pelosok, harganya disamakan?. Kan pemerintahpun mengerti keinginan masyarakat, namun jangan sampai merugikan pemerintah pula”.

- e. Data yang disampaikan oleh Komunique Bersama pada saat audiensi dengan Bupati Kabupaten Sumedang, menyatakan bahwa harga yang dibayarkan kepada masyarakat pada tahun 1984/1985 di Desa Cipaku, Pakualam dan Karangpakuan tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah melalui SK Dirjen Bina Marga Wilayah Timur tentang pembebasan tanah rencana proyek Jatigede.
- f. Nilai kompensasi lahan/ganti rugi yang diterima umumnya belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena harga yang ditetapkan terlalu murah dan tidak seimbang dengan harga sebenarnya, sehingga masyarakat tidak bisa membeli lahan lain diluar lokasi genangan.

Hasil wawancara pribadi dengan Kasubid AMDAL (Gandhi, tanggal 13 Juni 2012, di kantor BLH), “saya selaku OTD Pembangunan Waduk Jatigede, namun saya merasa tidak dirugikan dengan masalah pembayaran tersebut. Uang hasil ganti rugi tersebut saya belikan dengan tanah dan membuat rumah baru, namun masyarakat yang lain malah seperti mendadak kaya dan hura-hura, mereka ada yang membeli kendaraan baru dan sebagainya, itu terlihat oleh saya”.

Sedangkan sebagian masyarakat yang telah diwawancarai mengatakan “uang yang mereka terima dari hasil pembayaran memang sebagian mereka tabung, membeli keperluan rumah tangga, tanah, membeli kendaraan dan sebagainya, namun tidak sedikit juga ada masyarakat yang istilahnya hura-hura dengan uang tersebut, karena mereka mengira tempat tinggalnya tidak tahu kapan pasti digenangnya, maka mereka menghambur-hamburkan uang tersebut, dan mereka juga beranggapan pasti akan dibayar lagi suatu saat nanti”.

3. Relokasi penduduk

Wilayah rencana pembangunan Waduk Jatigede merupakan kawasan yang padat penduduk, baik di areal rencana genangan maupun di areal sekitar kawasan bendung. Dari ketentuan terkait pembebasan lahan, dapat dijelaskan bahwa ada tiga dasar hukum yang dijadikan acuan pembebasan lahan dan bangunan di wilayah Pembangunan Waduk Jatigede yang berkonsekwensi terhadap upaya pemindahan penduduk di daerah tersebut.

Dasar dan uraian pembebasan lahan dan bangunan Pembangunan Waduk Jatigede (BAPPEDA, 2011: 49) adalah sebagai berikut:

- a. Permendagri Nomor 15 tahun 1975.
 - Pembebasan lahan dan bangunan dilaksanakan pada tahun 1982 sampai dengan 1986.
 - Jumlah penduduk yang lahan dan bangunannya dibebaskan sebanyak 4.065 KK, 131 KK di antaranya sudah dimukimkan kembali oleh pemerintah.
 - Berdasarkan aturan tersebut penduduk harus dimukimkan kembali.
- b. Keputusan presiden Nomor 55 tahun 1993.
 - Pembebasan lahan dan bangunan dilaksanakan pada tahun 1994 sampai dengan 1997.
 - Jumlah penduduk yang lahan bangunannya dibebaskan sebanyak 1.226 KK.
 - Berdasarkan aturan tersebut penduduk harus pindah secara swakarsa mandiri, tetapi sudah tidak mempunyai biaya untuk pindah.
- c. Peraturan presiden Nomor 36 tahun 2005.

- Pembebasan lahan dan bangunan dilaksanakan pada tahun 2001 sampai dengan sekarang.
- Jumlah penduduk yang lahan bangunannya dibebaskan sebanyak 1.918 KK.
- Berdasarkan aturan tersebut penduduk harus pindah secara swakarsa mandiri, tetapi terdapat 600 KK yang tergolong keluarga pra KS.

Dalam perkembangannya, penduduk dari tahun 1982 sampai dengan akhir tahun 2010 cenderung terus bertambah. Hal ini terlihat dari hasil pendataan yang dilaporkan oleh SATKER Jatigede (sebelum tahun 2006). Satgas Jatigede (akhir tahun 2007) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang (tahun 2010).

Hasil wawancara dengan Ketua Sub Bidang Sosial BAPPEDA (Mety, tanggal 6 Juni 2012, di kantor BAPPEDA) dan menurut hasil penelitian dari pihak BAPPEDA (BAPPEDA, 2011: 50), terdapat beberapa opsi yang dilakukan dalam upaya memindahkan penduduk di antaranya:

1. Transmigrasi, di antaranya ke Jambi, Riau, Bengkulu dan Kalimantan Selatan
2. Relokasi/Resettlement ke daerah (kabupaten) penerima manfaat dari waduk Jatigede
3. Sisipan pedesaan, diutamakan untuk penduduk yang pembebasan tanahnya antara tahun 1982-1986, di mana dalam pelaksanaannya didahului oleh pendataan arah minta penduduk dari daerah genangan
4. Swakarsa mandiri, di mana penduduk harus pindah dengan kewajiban sendiri.

Dalam peraturan Bupati Sumedang nomor 96 tahun 2009 dijelaskan bahwa ada beberapa hak penduduk pada pemukiman baru yang perlu diperhatikan, di antaranya:

- Bangunan rumah tipe 36
- Tanah seluas 400 m²
- Bantuan pengangkutan ke lokasi tujuan
- Sanitasi dan sarana air bersih
- Bantuan pemulihan ekonomi selama 1 tahun
- Bimbingan dan pelatihan untuk pengembangan usaha
- Fasilitas umum dan fasilitas sosial

Keresahan masyarakat yang merupakan dampak primer dari kegiatan pembebasan lahan. Terjadinya keresahan masyarakat menjadi dampak penting, karena pada rona lingkungan awal kondisi masyarakat tidak terdapat pengaruh apapun yang mempengaruhi kehidupan mereka, namun dengan adanya pemberitahuan awal akan adanya Pembangunan Waduk Jatigede, maka akan timbul persepsi positif maupun negatif.

Dalam konteks penelitian dan penulisan perihal Dampak Pembangunan Waduk Jatigede Terhadap Masyarakat Calon Genangan di Desa Leuwihideung, disamping membahas masalah dampak positifnya juga mengkaji dampak negatifnya terhadap masyarakat Desa Leuwihideung.

Dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat Desa Leuwihideung yaitu sangat mencolok pada bagian pelaksanaan pembayaran ganti rugi dan perelokasian penduduk. Desa Leuwihideung sudah dilaksanakan perihal penggantian rugi yaitu

sekitar tahun 1996an. Namun pada waktu itu pembayaran ganti rugi tidak disepakati oleh masyarakat Desa Leuwihideung, tetapi pemerintah tetap saja membayar ganti rugi tersebut kepada masyarakat Desa Leuwihideung. Karena pada saat itu masyarakat masih berpikiran “*ah iraha boa jadi eta Jatigede, boa-boa arurang tos maraot*”. Jadi mereka menerima saja uang ganti rugi tersebut, tanpa memikirkan dampak apa yang akan dirasakan masyarakat nantinya. Pembayaran ganti rugi tersebut tidak dilakukan serentak, namun sebagian-sebagian pembayaran ganti rugi diberikan kepada masyarakat yang terkena genangan. Akibatnya sampai sekarang, adanya kesemburuan sosial antara masyarakat yang dibayar waktu dahulu sama masyarakat yang dibayar sekarang-sekarang ini. Selain pembayarannya yang berbeda, dulu sebelum pembayaran dilakukan, tempat tinggal dan lahan-lahan yang dimiliki oleh masyarakat dilakukan pengukuran, namun waktu itu pengukurannya tidak sah.

Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang masyarakat Leuwihideung (Eron, tanggal 24 Juni 2012, di kediamannya) “meskipun kita warga Leuwihideung sudah dibayar waktu dulu, namun pengukuran tersebut kami anggap tidak sah, tidak hanya pembayaran yang berbeda dengan daerah-daerah lain, namun pengukuran lahan-lahan yang kami miliki tidak sesuai dengan ukuran yang ada. Karena waktu itu ada informasi, kalau lahan yang dimiliki oleh masyarakat besar, maka harga pajak yang akan dipotong dari hasil pembayaran ganti rugi tersebut pula akan besar, maka dari itu masyarakat mulai bingung dengan informasi yang beredar pada saat itu, jadi akhirnya kita memanipulasi ukuran yang kita miliki waktu itu, padahal

lahan yang kita miliki dengan ukuran yang diberikan kepada pemerintah dan pihak pembayaran tidak sesuai dengan ukuran sebenarnya”.

Keresahan yang dirasakan oleh masyarakat sangat mengkhawatirkan, uang pembayaran ganti rugi yang mereka terima dulu, kini telah habis, sedangkan Pembangunan Waduk Jatigede rencananya akan terselesaikan pada tahun 2013, dan tahun 2013 tersebut masyarakat sudah harus direlokasikan, pemerintah memiliki beberapa cara untuk memindahkan penduduk yang akan digenangi rumahnya. Di antaranya yaitu melalui transmigrasi, bedol desa, pindah sendiri, dan sisipan pedesaan. Dari beberapa cara yang diajukan oleh pemerintah tersebut, masyarakat harus memilih salah satunya.

Namun hampir seluruh masyarakat Leuwihideung yang diwawancarai, mereka mengatakan ingin dipindahkan oleh pemerintah karena mereka tidak mampu untuk pindah sendiri. Seperti hasil wawancara dengan Kepala Desa Leuwihideung, (H. Amid Sunara, tanggal 8 Juni 2012, di kediamannya) beliau mengatakan “80%-90% masyarakat Desa Leuwihideung belum pindah, karena mereka tidak mampu untuk pindah sendiri, padahal mereka ingin pindah sendiri, karena dengan pindah sendiri mereka memilih tempat tinggalnya sesuai dengan minatnya sendiri. Yang 10% tersebut sudah pindah, ada yang pindah sendiri dan ada yang bertransmigrasi ke pulau-pulau yang telah di ajukan oleh pemerintah. Namun mereka yang telah bertransmigrasi ada sebagian penduduk yang pulang lagi kesini”.

Maka dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Kepala Desa Leuwihideung di atas, pemerintah sudah merasakan kerugian yang dilakukan oleh

masyarakat yang bertransmigrasi namun mereka kembali lagi ke kampung halamannya. Sedangkan rumah dan lahan yang mereka miliki di transmigrasian tersebut mereka menjualnya, dan hasil penjualan tersebut mereka pakai untuk ongkos mereka pulang lagi ke kampung halamannya.

Seperti hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat Leuwihideung yang pernah bertransmigrasi namun kembali lagi pulang ke Desa Leuwihideung (Bocih, tanggal 24 Juni 2012, di kediamannya) “oleh pemerintah kami di iming-imingi bahwa transmigrasi itu enak, akan dikasih uang, rumah, modal untuk usaha di sana, diongkosin dan sebagainya. Memang itu benar, namun setelah di sana kami baru merasakan bagaimana hidup di pulau orang lain yang di tempat tersebut jauh kemana-mana, apalagi bahan baku serba mahal. Kami tidak betah, apalagi kalau membawa anak kecil pasti repot. Jarak antara rumah satu dan rumah lainnya sangat berjauhan, kita tidak mempunyai tetangga yang berdekatan. Listrik belum ada, terus banyak hewan buas yang kesana kemari. Kami takut, dan tidak lama kemudian kami memutuskan untuk pulang”.

Akibat Pembangunan Waduk Jatigede yang berdampak sosial tersebut, maka sering kali masa berdemonstrasi ke tempat Pembangunan Waduk Jatigede, masyarakat berbondong-bondong untuk melakukan demonstrasi. Mereka menginginkan kejelasan atas penggantian rugi tersebut. Karena sampai sekarangpun belum ada kejelasan mengenai penggantian rugi tersebut.

Ada lagi informasi-informasi yang beredar di masyarakat mengenai penggantian rugi tersebut, rencananya pemerintah akan mengganti rugi lagi terhadap masyarakat yang sudah menerima pembayaran di tahun-tahun

sebelumnya. Namun, tidak tahu kapan kepastian penggantian rugi tersebut dilaksanakan lagi. Yang bisa dilakukan masyarakat hanyalah menunggu.

Rencananya penggantian rugi tersebut yaitu sebagai uang gusuran terhadap masyarakat calon genangan. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa Leuwihideung (H. Amid Sunara, tanggal 8 Juni 2012, di kediamannya), beliau mengatakan, “insyaallah pertengahan tahun 2013, akan mulai dilaksanakan pembagian uang gusuran tersebut”.

Seperti hasil wawancara dengan pihak SATKER Jatigede (Diki, tanggal 10 Juni 2012, di kantor SATKER), beliau mengatakan “dari pihak kami (SATKER) sudah menyuruh kepada pihak pembayaran ganti rugi, agar pembayaran ganti rugi atau uang gusuran tersebut segera bagikan kepada masyarakat. Agar dampak sosial tersebut semakin berkurang. Kalau dampak sosial belum juga teratasi atau dari pihak masyarakat masih merasakan dampak sosial tersebut, maka Waduk Jatigede masih belum bisa di operasikan. Pengisian air Waduk Jatigede akan segera di operasikan apabila dari pihak masyarakat sudah tidak ada lagi dampak yang dirasakan masyarakat, khususnya dampak sosial tersebut. Namun, dari pihak masyarakatpun jangan sampai merugikan pihak kita, sudah dibayar namun tidak pindah-pindah juga. Saya juga berharap tidak ada lagi pembuatan *rumah hantu*, karena rumah hatu tersebut akan merugikan pemerintah. Saya berharap, kerjasamanya juga dengan masyarakat yang terkena dampak, kalau kita sudah membayar ganti rugi tersebut, maka masyarakatpun harus cepat-cepat untuk pindah”.

Menurut Armour (Sudharto P. Hadl, 1997: 116), ahli studi dampak sosial dari Kanada, mengatakan: ganti rugi merupakan bentuk pengelolaan lingkungan yang konvensional. Disebut demikian karena bentuknya hanya berupa kompensasi atas kehilangan dan kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan proyek. Karenanya lalu ada ungkapan sinis: “namanya saja ganti rugi, meskipun sudah diganti ya tetap rugi”.

Ganti rugi yang banyak menimbulkan konsekuensi sosial ekonomi adalah yang berkenaan dengan pemindahan hak atas lahan baik itu berupa sawah, tambak maupun pekarangan. Secara teoritis kalau besarnya ganti rugi memadai atau relative lebih tinggi dari harga pasar, pemilik lahan mampu melakukan transformasi ekonomi dengan membeli lahan garapan sejenis di tempat lain.

Selain pemilik lahan, kelompok masyarakat yang turut dibuat repot karena proses ganti rugi adalah para buruh yang menggantungkan hidupnya pada lahan yang dibebaskan. Dengan perpindahan hak milik atas lahan, para buruh praktis harus kehilangan pekerjaan.

Strategi tetesan ke bawah (*trickle down effect*) melalui pembangunan mega proyek ternyata tidak mampu memercik pada penduduk lokal seperti para bekas buruh lokal. Dampak sosial memang tidak bisa diukur dengan perhitungan matematis misalnya hilangnya pekerjaan di sektor pertanian lebih kecil dibanding dengan kesempatan kerja yang muncul dari kehadiran proyek.

Michael Cernea, sosiolog yang bekerja pada Bank Dunia (Sudharto P. Hadl, 1997: 117), memandang bahwa perhitungan kuantitatif akan menghilangkan unsur keadilan (*fairness*). Kesulitan (*hardship*) yang dialami oleh pekerja tambak atau

buruh tani karena kehilangan pendapatan dan harus mencari pekerjaan baru, tidak akan bisa diminimalisasi dengan keberuntungan yang diperoleh dari mereka yang bekerja di proyek atau industri.

Jika ganti rugi itu untuk pembebasan tempat di mana penduduk tinggal, implikasi sosialnya lebih besar karena penduduk harus pindah ketempat lain. Proses pemindahan penduduk untuk mega proyek pembangunan waduk jatigede berjalan alot. Masyarakat yang telah mapan biasanya memiliki ikatan sosial yang tinggi. Ikatan itu menjadi lem perekat bagi warga masyarakat untuk tetap menyatu. Hijrah ketempat lain akan berarti pudarnya kekerabatan, karena tempat baru selalu terpecah. Kekerabatan untuk pindah juga terjadi pada penduduk yang memiliki ikatan historis dengan tempat tinggal. Yang termasuk dalam kategori ini di antaranya penduduk yang tinggal di tanah warisan orang tua atau mereka yang telah lama tinggal di desa itu. Jadi dalam hal ini tidak diherankan apabila masyarakat yang sudah menerima pembayaran ganti rugi, namun mereka belum pindah juga. Meskipun ganti rugi tersebut sudah dipandang cukup.

3. Dampak Budaya

a. Adat Istiadat dan Pola Kebiasaan Masyarakat

Seperti hasil wawancara dengan Sekretaris Administrasi SATKER Jatigede (Diki, tanggal 11 Juni 2012, di kantor SATKER Jatigede), bahwa kegiatan mobilisasi dan pemukiman tenaga kerja diperkirakan berdampak pada adat istiadat/pola kebiasaan masyarakat setempat dengan jumlah tenaga kerja pendatang yang akan bermukim di wilayah genangan seperti Kecamatan Darmaraja, Kecamatan Jatinunggal, Kecamatan Wado, dan Kecamatan Jatigede.

Prakiraan dampak terhadap adat istiadat/pola kebiasaan masyarakat disebabkan oleh terjadinya proses sosialisasi budaya antara penduduk asli dan pendatang melalui proses interaksi yang merupakan hubungan timbal balik dan akan terjadi proses saling mempengaruhi.

Selain itu kegiatan mobilisasi tenaga kerja konstruksi yang akan menyerap sekitar 1.026 orang tenaga kerja dimana sekitar 29.63% merupakan tenaga kerja pendatang diperkirakan menimbulkan dampak terhadap pola kebiasaan yang berlaku di masyarakat baik positif maupun negatif. Dampak positif diperkirakan terjadi apabila keberadaan tenaga kerja dapat memberikan pengaruh positif bagi adat istiadat dan pola kebiasaan yang berlaku di masyarakat, seperti terjadinya proses identifikasi masyarakat karena adanya pengaruh etos kerja yang tinggi dari tenaga kerja pendatang dan meningkatnya keinginan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi karena tenaga kerja pendatang umumnya memiliki keahlian dan tingkat pendidikan yang tinggi. Dampak negatif terjadi apabila tenaga kerja membawa pola kebiasaan yang bertentangan dengan norma agama atau sistem nilai yang berlaku di masyarakat seperti kebiasaan mabuk-mabukan atau memakai narkoba yang akan ditiru oleh anak-anak muda yang melakukan interaksi dengan tenaga kerja.

b. BCB (Benda Cagar Budaya) dan Kebudayaan

Lokasi Pembangunan Waduk Jatigede merupakan yang kaya dengan peninggalan arkeologis dan aktivitas budaya lainnya. Pembangunan Waduk Jatigede dan aktivitasnya tentu tidak hanya berdampak pada kelestarian situs/ benda cagar budaya (BCB) yang banyak tersebar di kawasan tersebut (aspek fisik),

melainkan juga terhadap adat istiadat (aspek non fisik) yang selama ini berkembang di masyarakatnya (Tarsa, tanggal 21 Juni 2012, di kediamannya), di antaranya:

- Bubur Suro, yang berkembang di wilayah dusun Cihideung, Desa Leuwihideung Kecamatan Darmaraja;
- Babon Darmaraja, yang berkembang di Kecamatan Darmaraja;
- Hajat Lembur, yang tersebar hampir di setiap kecamatan di lokasi kawasan Pembangunan Waduk Jatigede.
- Mukaraman, di Dusun Kebontiwu Desa Cibogo Kecamatan Darmaraja.

Sementara untuk situs/BCB, sebagian besar berada di lahan yang kelak menjadi genangan waduk dan sebagian kecil lainnya di luar lahan genangan. Mengingat pentingnya BCB sebagai bukti sejarah yang berguna dalam penyusunan sejarah suatu komunitas/bangsa maka keberadaannya harus dijaga agar tetap lestari, sebagaimana amanat Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (BCB) dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 7 tahun 2003 tentang pengelolaan kepurbakalaan, kesejarahan, nilai-nilai tradisional dan Museum. Demikian pula dengan situs/BCB yang akan terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede, telah lama memberikan peran dalam kehidupan masyarakat sekitarnya dan menjadi bagian dalam sejarah lokal Sumedang, bahkan Nasional.

Terkait dengan hal tersebut, dalam tim SATGAS, sesuai Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 611.1/Kep.124-Sarek/2006 tanggal 23 Februari 2006 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Waduk Jatigede terdapat Tim Penanganan Cagar Budaya, yang mempunyai tugas, sebagai berikut:

1. Menginventarisasi cagar budaya yang berada di daerah rencana genangan Waduk Jatigede dan akan dipindahkan.
2. Membantu pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat mengenai rencana pemindahan cagar budaya.
3. Melaporkannya kepada Dinas/Badan/Lembaga terkait.
4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan baik yang sudah, sedang, maupun yang akan dilaksanakan kepada satuan tugas setiap tiga bulan satu kali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Seperti hasil wawancara dengan pihak pengelola situs budaya Desa Leuwihideung (Tarsa, tanggal 21 Juni 2012, di kediamannya), beliau mengatakan bahwa situs budaya yang terdapat di Desa Leuwihideung tersebut akan dipindahkan atau akan diselamatkan oleh tim penyelamat yang sudah disiapkan.

Sedangkan dari hasil penelitian tim ahli serta berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumedang diketahui terdapat 42 situs (93 objek) yang tersebar di 4 Kecamatan (Darmaraja, Jatigede, Jatinunggal, dan Wado) (BAPPEDA, 2001: 57) . Dari jumlah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Situs yang akan tergenang sebanyak 32 situs (75 objek)
2. Situs yang tidak tergenang tetapi terkena dampak langsung Pembangunan Waduk Jatigede sebanyak 10 situs (19 objek)
3. Situs yang telah direlokasi sebanyak 5 situs (7 objek)

Tidak hanya dampak ekonomi, sosial saja yang meresahkan warga, namun dampak budaya pun ikut-ikutan meresahkan warga. Banyak sekali makam para leluhur yang

terdapat di Desa Leuwihideung. Seperti hasil wawancara penulis dengan ketua pengelola situs budaya di daerah genangan Jatigede (Tarsa, 21 Juni 2012, di kediamannya), beliau mengatakan terdapat 12 situs atau makam leluhur di Desa Leuwihideung. Dan menurutnya telah mengadakan tim penyelamatan situs berbudaya di daerah calon genangan khususnya Desa Leuwihideung. Tim penyelamatan tersebut bekerjasama dengan balai keperbukalaan yang tempatnya di Dipatiukur Bandung.

Dampak budaya tersebut jelas akan merugikan bagi kita sebagai masyarakat Desa Leuwihideung, ujarnya. Karena di Desa Leuwihideung banyak makam-makam leluhur yang dikeramatkan. Beliau pun mengatakan ketidak setujuannya terhadap pembangunan Waduk Jatigede tersebut, apalagi dikaitkan dengan situs budaya yang ada di daerah genangan.

Namun wawancara dengan Kasubid sosial BAPPEDA (Mety Supriyati, tanggal 6 Juni 2012, di kantor BAPPEDA), beliau mengungkapkan “makam-makam yang dikeramatkan oleh masyarakat akan dipindahkan, namun terdapat satu makam leluhur yang tidak bisa dipindahkan, dan itu merupakan masalah lagi bagi kita. Namun, pihak masyarakat dan pengelola makam-makam leluhur tersebut meminta agar makam tersebut jangan di pindahkan, namun tempat yang dijadikan makam tersebut harus di dibuat sebuah monumen tinggi, yang nantinya kalau pembangunan Waduk Jatigede sudah digenangi, monumen makam tersebut bisa dijadikan tempat wisata atau tempat ziarah”.

Tidak hanya situs budaya saja yang berada di Desa Leuwihideung, namun kesenianpun ada, di antaranya kesenian yang terkenal di Darmaraja dan Leuwihideung (Dharmawan Ider Alam, 2008: 32-35) yaitu:

1) Seni tayub

Seni tayub berasal dari talaga, dibawa oleh para seniman talaga ke Darmaraja yaitu pada zaman kerajaan dinasti Prabu Tadjimalela. Perangkat seni tayub yaitu gamelan pelog, namun setelah berkembangnya zaman sekarang-sekarang ini menggunakan gamelan laras salendro.

Seni tayub sekedar merupakan hiburan saja, tetapi merupakan mediasi juga untuk manusia dan manusia, manusia dengan sang pencipta, dan untuk menghadapi ujian-ujian atau kehidupan godaan kehidupan untuk melanggengkan kebudayaan gotongroyong.

Budaya kadarmarajaan menjelaskan kejadian-kejadian yang menyangkut warisan budaya yang tetap di daerah darmaraja. Budaya warisan ditanamkan oleh karuhun yang sifatnya menciptakan pandangan-pandangan, keinginan, sama jauhnya seperti hasil yang sudah tetap membangun bentuk atau sifat masyarakatnya.

Warisan budaya dalam bentuk fisik di antaranya situs makam keramat (karuhun), dengan kabuyutan yaitu tempat-tempat yang disakralkan atau *kapamalian*. Sedangkan budaya dalam bentuk normatif atau luar dalam wujud seperti tradisi, kesenian, cerita lisan (*floklore*) yang esensinya yaitu kearifan lokal, turun-temurun. Tradisi-tradisi dipandang cerita saja, tetapi esensinya kelengkapan kebudayaan karena di dalamnya mempunyai ranah-ranah kebudayaan yaitu tatacara

kehidupan, sistem pangan dan papan, keseimbangan lingkungan (ekologi), kemasyarakatan, bahasa, sastra, kesenian, ilmu pengetahuan dan sistem keagamaan (religi) (Dharmawan Ider Alam, 2008: 7).

Selain sadar, manusia berada dalam hubungan vertikal dan horizontal. Intinya membenarkan lambang-lambang yang dikenalkan, tetapi dalam keadaan yang berbeda, yaitu dalam mengikat kesucian, dan perubahan, tetapi dalam sisi lain, ketetapanannya tidak bisa di rubah sikilnya.

Beberapa tradisi atau budaya yang selalu dilakukan oleh masyarakat Desa Leuwihideung (Dharmawan Ider Alam, 2008: 9-11) di antaranya:

1. Tradisi Muharaman

Yaitu berupa hajat muharaman, yang dilaksanakan pada tanggal 14 pada bulan Muharam.

2. Ngaruat Lembur

Ngaruat lembur atau dikenal dengan istilah ngarot, dilaksanakan setiap tahunnya, yaitu supaya kampung yang mereka tinggali agar terselamatkan dari marabahaya.

3. Ziarah atau Nyekar

Ziarah atau nyekar ke makam keramat, maksudnya berdoa di makam, dan membawa wewangian. Agar arwah karuhun di alam sana di ampuni dosanya, dan orang yang berziarah pun dikabulkan doa nya.

4. Ngikis

Ngikis artinya menghilangkan penyakit yang ada di dalam tubuh manusia, yaitu dengan cara melewati kumpulan makam keramat sambil meminta doa agar doanya di kabulkan, agar terselamatkan dari marabahaya dan sehat lahir batin.

5. Hajat Uwar

Uwar asal katanya dari ajakan. Hajat uwar dilaksanakan pada suatu waktu ada tanda-tanda, seperti gerhana, bintang jatuh, angin puyuh, gempa dan sebagainya.

4. Dampak Ekologi

Aspek lingkungan perlu diperhatikan secara serius oleh setiap perencana pembangunan. Hal ini penting karena lingkungan memiliki dampak yang sangat besar terhadap berhasil atau tidaknya program pembangunan. Pembangunan yang kurang memperhatikan masalah lingkungan akan memiliki nilai relevansi yang rendah terhadap perubahan, terutama yang terkait dengan masalah-masalah kemasyarakatan sebagai ornamen penting dalam proses pembangunan berdasarkan ruang lingkungannya, aspek lingkungan dapat terbagi menjadi dua bagian. Pertama lingkungan internal, yakni lingkungan yang berada di dalam populasi dimana perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan, kedua lingkungan eksternal, yakni lingkungan yang berada di luar populasi tetapi mempunyai pengaruh yang kuat terhadap tingkat keberhasilan suatu program pembangunan.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian mengenai Dampak Pembangunan Waduk Jatigede Terhadap Masyarakat Calon Genangan di Desa Leuwihideung, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kurangnya kesemangatan dalam bekerja, serta masyarakat menuntut agar pemerintah segera memberikan ganti rugi/uang gusuran merupakan dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat Desa Leuwihideung akibat Pembangunan Waduk Jatigede, karena, pembayaran ganti rugi yang dulu tidak cukup untuk membiayai mereka pindah. Masyarakat juga menginginkan pemerintah tidak hanya mengganti rugi saja, namun di tempat tinggal baru nanti disediakan lahan untuk sumber penghasilan.
2. Dampak sosial yang diakibatkan Pembangunan Waduk Jatigede terhadap masyarakat Desa Leuwihideung yang dirasakan meliputi: pelaksanaan pembayaran ganti rugi dan relokasi penduduk. Padahal pembangunan fisik Jatigede sudah mencapai 73%an, namun masalah perelokasian penduduk masih terkatung-katung.
3. Hilangnya situs budaya yang berada di Desa Leuwihideung, apalagi makam-makam yang dikeramatkan oleh warga Desa Leuwihideung semuanya akan ikut tersapu. Sedangkan masyarakat menginginkan agar situs budaya tersebut tidak punah, apalagi masyarakat Desa Leuwihideung sampai saat ini masih mempercayai adanya mitos.

4. Dampak ekologi yang dirasakan masyarakat Desa Leuwihideung akibat Pembangunan Waduk Jatigede yaitu kegaduhan suara-suara yang menggelegar serta guncangan-guncangan seperti gempa akibat pemboman Gunung Julang yang dilakukan oleh pihak pembangunan Waduk Jatigede. Mereka membom Gunung Julang untuk mendapatkan batu-batu yang terdapat di gunung tersebut. Batu tersebut akan digunakan untuk pembangunan bendungan.
5. Hampir seluruh masyarakat yang telah diwawancarai (20 orang) mengatakan bahwa mereka tidak setuju dengan pembangunan tersebut, karena pembangunan tersebut akan merugikan mereka yang menjadi calon genangan. Namun, mereka juga berharap agar pembangunan tersebut di masa yang akan datang jangan sampai merugikan masyarakat yang terkena dampak.
6. Upaya pemerintah dalam menanggulangi dampak yang dirasakan atau yang akan dirasakan oleh masyarakat calon genangan tersebut di antaranya:
 - a. Dampak ekonomi
Pengembangan perikanan, Pengembangan pariwisata, Pengembangan pertanian, Pengembangan peternakan, Pengembangan dan penataan pemukiman, Pembangunan infrastruktur perekonomian, Pembangunan dan pengembangan daerah irigasi. Serta percepatan pembayaran ganti rugi.
 - b. Dampak sosial
Dalam bidang pembebasan lahan: Verifikasi data, pembebasan lahan masyarakat, pembebasan lahan terlewat, Pembebasan lahan kehutanan, Peningkatan kapasitas Panitia pengadaan tanah, Penyelesaian permasalahan rumah tumbuh.
Dalam bidang relokasi penduduk: penentuan arah minat, penentuan regulasi, pengadaan lahan relokasi, penuntasan infrastruktur pemukiman, koordinasi lintas wilayah dan jenjang, pembekalan dan pendampingan.

c. Dampak budaya

Penuntasan relokasi situs, sosialisasi, koordinasi, kelembagaan budaya, Pembangunan kampung Sunda, pelestarian seni dan adat tradisional.

d. Dampak ekologi

- Eksploitasi bersistem, penguatan tebing, penghijauan, dan penanaman rumput.
- Bangunan harus konsisten dengan desain, serta penerapan teknologi yang disesuaikan dengan kondisi alam Jatigede.
- Pemadatan tanah urugan, penghijauan, penanaman rumput, dan pengaturan *drainase*.
- Penghijauan di sepanjang daerah aliran sungai, penguatan tebing sungai, pemetaan dan larangan penambangan di lokasi-lokasi kritis.
- Pemadatan areal, pendataran dan pengurugan dengan *top soil* lahan budidaya, penanaman rumput, pengaturan *drainase*, dan penghijauan.

- **DAFTAR PUSTAKA**

- Abu Ahmadi. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya. 2003.
- . *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya. 1990.
- Achmad Fedayani Saifuddin. *Konflik dan Integrasi*. Jakarta: Rajawali. 1986.
- Agoes Soegianto. *Ilmu Lingkungan: Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*. Surabaya: Airlangga University Press. 2005.
- Amri Marzali. *Antropologi dan Pembangunan*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Ariyono Suyono. *Kamus Antropologi*. Jakarta: CV Akademia Pressindo. 1985.
- Astrid S. Susanto. *Sosiologi Pembangunan*. Jakarta: Bina Cipta. 1984.
- . *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Bandung: Putra A. Bidrin. 1999.
- Badan Lingkungan Hidup. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Bendungan Serbaguna Jatigede*. 2012.

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). *Perencanaan Penanggulangan Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Waduk Jatigede*. Sumedang. 2011.
- Bintaro Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaya. *Teori Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: PT Gunung Agung. 1983.
- Daftar isian potensi Desa Leuwihideung. 2011.
- Dharmawan Ider Alam. *Rucatan Budaya Sunda Kadarmarajaan*. Sumedang: Yayasan Sumedang Makalangan. 2008.
- Doyle Paul Johnson. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern 2*. Jakarta: PT Gramedia. 1986.
- Elly M Setiadi, M.Si. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Emil Salim. *Pembangunan berwawasan lingkungan*. Jakarta: LP3ES. 1991.
- Imam Supardi. *Lingkungan hidup dan kelestariannya*. Bandung: Alumni. 1994.
- Imam Suprayogo. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Rosda Karya. 2001.
- Irawan Effendi. *Sosiologi*. Bandung: Angkasa. 1995.
- John Clark. *NGO dan Pembangunan Demokrasi*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana. 1995.
- Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. *Pembangunan Waduk Jatigede*. 2011.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta. 1990.
- Lambang Trijono. *Pembangunan Sebagai Perdamaian: Rekonstruksi Indonesia Pasca Konflik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2007.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2001.
- Michael P. Todaro. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga. 2006.

- Otto Soemarwoto. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2005.
- Pemerintah Kabupaten Sumedang. *Laporan Akhir Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Waduk Jatigede*. Sumedang: BAPPEDA. 2009.
- Rahman, M. Taufiq. *Glosari Teori Sosial*. Bandung: Ibnu Sina Press. 2011.
- Robert H. Lauer. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta. 2003.
- Sarlito Wirawan Sarwono. *Psikologi Sosial (Psikologi Kelompok dan Psikologi Terapan)*. Jakarta: Balai Pustaka. 2001.
- Simandjuntak dan Dra. I. L. Pasirbiru, SH. *Sosiologi Pembangunan*. Bandung: Tarsito. 1986.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada. 2006.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press. 1987.
- .*Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press. 2000.
- Soleman Taneko. *Struktur dan proses sosial*. Jakarta: Rajawali Press. 1984.
- Sudharto P. Hadl. *Aspek sosial AMDAL: Sejarah, Teori dan Metode*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1997.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2010.
- Sumadi Suryabrata. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1998.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Reaseach Jilid 2*. Yogyakarta: Rosda Karya. 1987.
- Tim Pustaka Phoenix. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix. 2007.

- Wardi Bachtiar. *Sosiologi Klasik: Dari Comte Hingga Parsons*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2006.
- Wawancara dengan KADES Leuwihideung. Bapak H. Amid Sunara. Pada tanggal 08 Juni 2012.
- Wawancara dengan SEKDES Leuwihideung. Bapak Engkos Kosasih. Pada tanggal 08 Juni 2012.
- Wawancara dengan pihak BAPPEDA Sumedang. Ibu Mety Supriyati sebagai Kepala Sub Bidang Sosial. Pada tanggal 06 Juni 2012.
- Wawancara dengan pihak BLH Sumedang. Bapak Gandhi sebagai Kepala Sub Bidang AMDAL. Pada tanggal 13 Juni 2012.
- Wawancara dengan pihak pengelola situs budaya Jatigede. Bapak Tarsa. Pada tanggal 21 Juni 2012.
- Wawancara dengan pihak SATKER Pembangunan Waduk Jatigede. Bapak Diki sebagai Sekretaris Administrasi. Pada tanggal 11 Juni 2012.